

**PENGARUH LATAR BELAKANG ANGGOTA DEWAN DAN
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH (APBD) DENGAN PERSONAL
BACKGROUND SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)**

**Oleh :
Riri Trycia Indra
Pembimbing : Andreas dan Alfiati Silfi**

*Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : Riristrycia@gmail.com*

*The Effect of The Board Knowledge About The Budget Of The Regional Financial
Supervision (APBD) with The Personal Background A Moderating Variable*

ABSTRACT

This study aimed to examine the Effect of The Board Knowledge About The Budget Of The Regional Financial Supervision (APBD) with The Personal Background A Moderating Variable on all members of Parliament in the area Kuansing. Using survey data from 35 questionnaires distributed, which can be processed is 33 questionnaires. Multiple linear regression analysis is used with the help of software SPSS 20.0. The result indicate that there is an effect between the board knowledge about the budget with the Regional Financial Supervision (APBD) at statistic value 0,017. Personal background use has an effect of the relationship between knowledge about the budget and the Regional Financial Supervision (APBD) at statistic value 0,016. And accountability use has an effect the relationship between knowledge about the budget and the Regional Financial Supervision (APBD) at statistic value 0,030, but not with transparency at statistic value 0,584.

Keywords : The Regional Financial Supervision (APBD), Moderate variable, and Multiple linear regression.

PENDAHULUAN

Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi sistem individu secara pribadi. Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan mungkin dapat mempengaruhi tugasnya sebagai anggota dewan. Kelemahan yang terjadi atas pengawasan keuangan

daerah mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya maupun individunya sebagai pelaku politik. Sehingga perlu ditelaah lebih dalam variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah. Variabel-variabel tersebut diantaranya personal background, political background transparansi kebijakan publik dan pengetahuan

dewan tentang anggaran. Dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang anggaran itu sendiri.

Variabel-variabel tersebut diantaranya personal background, political background transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang anggaran itu sendiri.

Selain variabel personal background dan political background terdapat faktor lain yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD) (Sari (2012).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rosita (2014) dengan judul pengaruh latar belakang anggota dewan, pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten oleh peneliti terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengawasan keuangan daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah adanya penambahan variabel, tempat dan tahun penelitian. Penelitian ini

dilakukan pada DPRD kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2019. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di DPRD Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut : (1) Apakah latar belakang anggota dewan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD)? (2) Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)? (3) Apakah personal background mempengaruhi hubungan antara latar belakang anggota dewan dan pengawasan keuangan daerah (APBD)? (4) Apakah personal background mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

Tujuan penelitian ini antara lain : (1) Untuk menguji dan menganalisis latar belakang anggota dewan akan memperkuat ataukah memperlemah pengaruh pengetahuan dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). (2) Untuk menguji dan menganalisis pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). (3) Untuk menguji dan menganalisis bahwa latar belakang anggota dewan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD).

Untuk menambah wawasan penulis dan hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan

yang sama. (2) Bagi para akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain. (3) Bagi anggota dewan Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini bermanfaat sebagai proses pengawasan keuangan daerah lebih cermat dan telititi lagi dalam menganalisa laporan keuangan daerah agar informasi yang didapat benar-benar membantu anggota dewan dalam mengambil keputusan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No.74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di

tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana.

Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001).

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk:

(1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Halim (2006:150) jenis-jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek diawasi, sifat dan pengawasan menurut metode.

Latar Belakang Anggota Dewan

Latar belakang anggota dewan (*Political Background*) merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik.

Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik, partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandate dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas Negara untuk kepentingan masyarakat.

Ketika pemilu dan pilkada, parpol berperan sebagai instusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan percalonan para pasangan kepala daerah, capres dan wapres, serta para calon anggota legislatif dipusat dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat.

Latar belakang anggota dewan (Political Background) yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi ada tidaknya pengalaman dipartai politik sebelum menjadi anggota dewan, jabatan di partai politik, ada tidaknya partai politik yang diikuti memberikan pengarahan tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab legislatif dengan baik dan benar, serta sejauh mana kepentingan partai lebih diutamakan oleh anggota DPRD, menganalisa dan menentukan percalonan para pasangan kepala daerah, capres dan wapres, serta para calon anggota legislatif.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserat hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotannya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak cukup hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono, 2003:63).

Personal Background

Pengertian personal background adalah Latar belakang diri yang melekat pada seorang individu yang dimaksud adalah anggota DPRD. Menurut Winarna (2007) terdapat beberapa pengertian personal background, yaitu : 1) Sejarah dan konsep yang ada pada diri seseorang didalam dunia politik, 2) Keterangan tentang seseorang bagaimana pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara, 3) Keterangan mengenai perjalanan politik seseorang untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun konstitusional.

Studi yang dilakukan Murni dan Witono (2003) yang meneliti pengaruh personal background dan political background terhadap peran DPRD dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa strata pendidikan, latar belakang pekerjaan dan asal politik, pengalaman di DPRD, idiologi parpol, dan asal komisi tidak berpengaruh secara signifikan. Indiani (2002) meneliti pengaruh dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Personal background merupakan latar belakang yang berkaitan dengan sumber daya

manusia. Latar belakang dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan anggota dewan, tingkat pendidikan dewan, dan latar belakang pekerjaan. Personal background berkaitan dengan SDM.

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Yudono (2002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Latar belakang anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

2. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah

ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada pada kualifikasi ideal dalam arti memahami benar hak, tugas dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan yang baik (Yudoyono, 2000). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah

3. Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan terhadap hubungan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Personal Background sebagai Variabel Pemoderasi

Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2014), Herewati (2014) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara latar

belakang anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh personal background.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₃: Latar belakang anggota dewan berpengaruh terhadap hubungan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan personal background sebagai variabel pemoderasi.

4. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap hubungan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Personal Background sebagai Variabel Pemoderasi

Werimon (2005) meneliti tentang pengaruh personal background terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin baik personal background anggota dewan maka pengetahuan dewan tentang anggaran akan semakin meningkat, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2014) yang menyimpulkan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh personal background. Personal background berhubungan dengan SDM.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

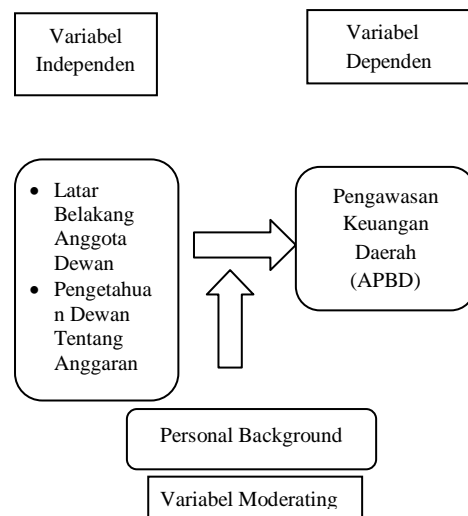
H₄ : Pengetahuan dewan tentang anggaran

berpengaruh terhadap hubungan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan personal background sebagai variabel pemoderasi

Model Penelitian

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen, dependen dan moderating yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini digambarkan model penelitian yang digunakan :

Gambar 1
Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2017 sampai selesai. Kuesioner penelitian ini disebar ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kuesioner ini dibagikan kepada responden, diisi oleh

responden dan kembali pada penulis lebih kurang 1 bulan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi itu (Sugiyono, 2008:389). Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel non probability sampling dengan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008:122). Maka jumlah responden dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2019. jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 35 orang.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Sumber Data

Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para aparat pemerintah yang bekerja di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jenis-jenis dari sumber data, yaitu : a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang telah disusun terlebih dahulu dan diberikan kepada responden yaitu kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi.

Pengumpulan Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (*scor*). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung seluruh Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Kuesioner akan dikirim langsung oleh peneliti kepada masing-masing responden, dan responden dalam penelitian ini adalah 35 responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Guna memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti sebagai dasar dalam menyusun kuesioner penelitian. Pada penelitian ini terdapat lima hal yang akan diteliti, yaitu Latar belakang anggota dewan, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Personal

background, Pengawasan Keuangan Daerah. Empat variabel tersebut kemudian dibedakan menjadi Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) sebagai dependen, Latar belakang anggota dewan dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran sebagai independen serta Personal Background sebagai variabel moderating. Variabel ini diukur dengan model skala likert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju responden terhadap pertanyaan yang diajukan, skor jawaban responden dalam penelitian ini terdiri atas lima alternatif jawaban yang mengandung variasi nilai yang bertingkatan dari objek penelitian melalui jawaban pertanyaan yang diberi nilai 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel

Kuesioner yang telah diisi dikembalikan secara langsung kepada peneliti, cepat atau lambat pengisian kuesioner sangat bergantung kepada kesibukan anggota dewan serta tidak adanya mereka ditempat saat itu. Tingkat pengembalian kuesioner dapat digambarkan seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	35	100%
Kuesioner yang kembali	35	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%

Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	2	5,71%
Kuesioner yang dapat dianalisis	33	94,29%

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 35 kuesioner atau sebesar 100%. Kuesioner yang kembali sebanyak 35 buah atau dapat dikatakan seluruh kuesioner yang disebar kembali. Setelah dilakukan pengolahan data, sebanyak 2 buah atau sebesar 5,71% tidak dapat dianalisis karena pengisian kuesioner yang tidak lengkap. Sehingga dapat disimpulkan kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 33 buah atau sebesar 94,29%.

Berdasarkan kuesioner yang dapat dianalisis, ringkasan mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin :		
a. Laki-laki	31	93,94%
b. Perempuan	2	6,06%
Total	33	100%
Umur :		
a. 20 - 30	3	9,10%
b. 31 - 40	14	42,42%
c. 41 - 50	10	30,30%
d. > 51	6	18,18%
Total	33	100%
Tingkat Pendidikan :		
a. SMA/Sederajat	10	30,30%
b. D1	0	0%
c. D2	1	3,03%
d. D3	1	3,03%
e. S1	19	57,58%
f. S2	2	6,06%
g. S3	0	0%
Total	33	100%

Jabatan di DPRD:		
a. Ketua	1	3,03%
b. WakilKetua	2	6,06%
c. Anggota	30	90,91%
Total	33	100%
BidangPendidikan:		
a.	5	15,15%
IlmuSosialdanPolitik	6	18,18%
b. Hukum	-	0%
c. Manajemen	5	15,15%
d. Teknik	3	9,09%
e. Akuntansi	4	12,12%
f. Ilmu Agama	10	30,30%
g. Lainnya		
Total	33	100%
Pekerjaanutamaseb elummenjadiAnggo taDewan:		
a. Anggota DPRD	7	21,22%
b. Birokrat	13	39,39%
c. Swasta	0	0%
d. Lainnya		
Total	33	100%
Pengalamansebagai AnggotaDewan:		
a. 1 periode	15	45,45%
b. 2 periode	18	54,55%
c. 3 periode	0	0%
Total	33	100%
PartaiPolitik:		
a. Golkar	10	30,30%
b. Gerindra	4	12,12%
c. Demokrat	2	6,06%
d. PAN	3	9,10%
e. PPP	2	6,06%
f. Hanura	3	9,10%
g. PBB	1	3,03%
h. Nasden	1	3,03%
i. PKB	1	3,03%
j. PKS	1	3,03%
k. PDIP	5	15,15%
Total	33	100%

Sumber : Data Olahan, 2017

Deskripsi Variabel Penelitian

Data penelitian ini diolah menggunakan perangkat SPSS 20.0, data statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi.

Tabel 3
Statistik deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Y	33	22	53	38.48	6.394
X	33	25	50	34.67	5.764
M1	33	14	36	24.33	4.884
M2	33	11	37	24.33	6.377
M3	33	32	96	77.33	9.505
Valid					
N	33				

Sumber : Data Olahan, 2017

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} .

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Data

Var.		$R_{hit.}$	$R_{tab.}$	Ket.
Penga wasan Keuan gan Daerah (Y)	P1	0,481	0,344	Valid
	P2	0,633	0,344	Valid
	P3	0,664	0,344	Valid
	P4	0,474	0,344	Valid
	P5	0,666	0,344	Valid
	P6	0,766	0,344	Valid
	P7	0,677	0,344	Valid
	P8	0,418	0,344	Valid
	P9	0,524	0,344	Valid
	P10	0,518	0,344	Valid
	P11	0,349	0,344	Valid
Penget ahuan Dewan Tentan g Angga ran (X)	P1	0,613	0,344	Valid
	P2	0,514	0,344	Valid
	P3	0,606	0,344	Valid
	P4	0,561	0,344	Valid
	P5	0,479	0,344	Valid
	P6	0,589	0,344	Valid
	P7	0,567	0,344	Valid
	P8	0,756	0,344	Valid
	P9	0,566	0,344	Valid
	P10	0,559	0,344	Valid
Person al Backgr ound (M1)	P1	0,442	0,344	Valid
	P2	0,465	0,344	Valid
	P3	0,457	0,344	Valid
	P4	0,470	0,344	Valid
	P5	0,520	0,344	Valid
	P6	0,681	0,344	Valid
	P7	0,680	0,344	Valid
	P8	0,514	0,344	Valid

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam variabel penelitian ini lulus uji validitas.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan taksiran batasan minimal 0.6. Variabel ini akan dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0.6.

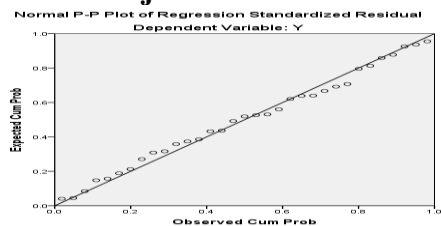
Tabel 5
Hasil Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Ket.
Y	0,749	0,6	Reliabel
X	0,772	0,6	Reliabel
M1	0,604	0,6	Reliabel
M2	0,706	0,6	Reliabel
M3	0,857	0,6	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2017

Uji Normalitas Data

Gambar 2
Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa sebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Autokorelasi

Secara umum adanya autokorelasi dapat dilihat dengan:

- Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasipositif,

- Angka D-W -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi, dan
- Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 ^a	.651	.553	4.273	1.902

a. Predictors: (Constant), X.M3, M2, X.M1, X, M1, X.M2, M3

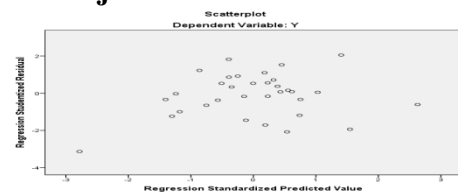
b. Dependent Variable: Y

Sumber :Data Olahan, 2017

Hasil uji Durbin Watson menunjukkan angka 1.902 untuk dependen variabel adopsi, berarti DW berada -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi, dengan demikian tidak ada autokorelasi dan data menunjukkan layak untuk diteliti.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Dari grafik diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada penggunaan persamaan regresi berganda adalah multikolinieritas,

yaitu suatu keadaan yang variabel bebasnya (independen) berkorelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Berikut ini Tabel yang menunjukkan hasil uji multikolinieritas:

Tabel 7

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X	.834	1.198
1 M	.908	1.102

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari tabel di atas, dapat dilihat hasil perhitungan nilai *tolerance* pada analisis data untuk model regresi. Diperoleh nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0.10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

Analisis Regresi Linear Berganda Uji Goodness of Fit

Hasil Uji R² dan Uji F pada Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 ^a	.651	.553	4.273	1.902

a. Predictors: (Constant), X.M3, M2, X.M1, X, M1, X.M2, M3

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari tabel 8, perhitungan nilai koefisien determinasi (R²) diperoleh nilai sebesar 0.842. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh sebesar 84.2% terhadap dependen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini.

Hasil Uji F

Tabel 9
Uji F
ANOVA^a

Model	F	Sig.
Regression	6.666	.000 ^b
1 Residual		
Total		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1.M, X2.M, X3.M, X

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari Tabel 8 diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil Uji regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Hasil uji t

Model	B	t	Sig.
(Constant)	154.009	2.475	.020
X	3.605	2.557	.017
X2	2.279	2.534	.018
1 M	2.141	1.965	.061
X1.M	.070	2.584	.016
X2.M	.075	2.300	.030

Sumber : *Data Olahan, 2017*

Pengujian Hipotesis Pertama

Dari tabel 10 dapat dilihat nilai t hitung sebesar 2.557 dan t tabel sebesar 2.475 dan p value (sign) 0,017 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa Latar belakang anggota berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bergaining position dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapasitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok serta partainya. Apabila anggota dewan tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan berkenaan dengan anggaran, maka anggota dewan tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Indradi (2001), Syamsiar (2001), Sutamoto (2002), Sopanah (2002) yang

menyimpulkan bahwa Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Pengujian Hipotesis Kedua

Dari tabel 8 dapat dilihat nilai t hitung sebesar 2.534 dan t tabel sebesar 2.475 dan p value (sign) 0,018 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, **H₀₂ ditolak dan H₂ diterima.**

Syahrudin dan Taifur (2001) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD. La Palombara (1974) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang, sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. Sedangkan Yudoyono (2000) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Syahrudin dan Taifur (2001) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja

ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD. La Palombara (1974) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang, sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. Sedangkan Yudoyono (2000) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Murni dan Witono (2003) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Political Background sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengujian Hipotesis Ketiga

Dari tabel 8 dapat dilihat nilai t hitung sebesar 2,475 dan t tabel sebesar 2,584 dan p value (sign) 0,016 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa Latar belakang anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan personal background sebagai variabel sebagai pemoderasi berpengaruh, **H_{03} ditolak dan H_3 diterima.**

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novatiani dan

Lestari (2014) yang mengatakan bahwa personal background sebagai variabel moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara latar belakang anggota dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2014).

Pengujian Hipotesis Keempat

Dari tabel 8 dapat dilihat nilai t hitung sebesar 0,555 dan t tabel sebesar 2,475 dan p value (sign) 0,584 yang artinya lebih besar dari 0,05 > 0,030. Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan personal background sebagai variabel pemoderasi, **H_{04} diterima dan H_4 ditolak.**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2014) yang menyimpulkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh personal background.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu :

1. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda dan perlu menambahkan variabel independen dan variabel moderating lainnya.
2. Karena pentingnya pengetahuan dewan tentang anggaran dalam proses pengawasan keuangan daerah, maka sebaiknya

anggota dewan lebih cermat dan teliti lagi dalam menganalisa setiap laporan keuangan daerah sehingga mungkin saja moral yang dimiliki anggota dewan dapat mempengaruhi pengawasan anggota dewan terhadap keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Hara Habibi. 2010. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pekanbaru*. Skripsi, Universitas Riau; Pekanbaru
- Mardiasmo. 2005. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta
- _____, 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta.
- Murni, Sri dan Banu Witono. 2004. *Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Jurnal Perspektif*, Vol. 9.
- Naszir, Mohammad, 2007, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Study Empiris Di Provinsi Papua*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Novatiani, R. Ait dan dan Nurmalita Lestari, 2014, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kota Bandung*, www.journal.widyatama.ac.id
- Rima, Rosseptalia 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. *Makalah*

- Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Syahrudin dan Taifur, Werry Darta. 2002. *Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi (The Role Of The Regional Assembly In Achieving The Objective Of Decentralization and Regional Perspectives In The Implementation Of Decentralization)*. Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas, Regional University Research , On Decentralization in Indonesia, Project 497-0357 / 204-000, ECG, USAID/Indonesia, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park
- Umar, Husein. 2005. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Umar, La Ode. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung. CV. Utomo.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Prosiding SNA X. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Yudoyono, Bambang. 2008. *Otonomi Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah / Penyunting Abdul Halim. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2002